



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : Kabar Timur Online

Ameks, 03 Agustus 2017

Proyek Mangkrak Pemda Buru Masuk “Radar” Kejati

KABARTIMUR.co.id, AMBON - Salah satu proyek mangkrak dan berbau ‘KKN’ milik Pemda Kabupaten Buru bakal diendus ‘korps baju coklat’ Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku. Proyek Water Front City senilai Rp 4,9 miliar yang didanai APBN Tahun 2015 ini, harusnya berjalan mulus. Tapi impian Bupati Ramly Umasugi untuk mempercantik pantai Namlea yang terkesan kumuh, melalui melalui proyek Reklamasi itu pupus di tengah jalan.

Perusahaan milik kerabat dekatnya, memenangkan proyek dimaksud. Tapi ternyata tak mampu menyelesaikan pekerjaan. Kejati Maluku memastikan, proyek yang dikerjakan oleh CV Aegeo Media Pratama milik kerabat dekat Umasugi itu ‘ditindaklanjuti’ dalam waktu dekat.

“Ia betul itu, sudah ada sprinlid. Tapi mohon ini disampaikan langsung oleh Kepala Humas Kejati aja ya,” kata Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Maluku Victor Saut ramah kepada Kabar Timur, Rabu (2/8) di kantor Kejati Maluku.

Kepala Humas yang dimaksud Victor Saut adalah Kepala Seksi Penerangan dan Hukum (Kasipenkum) Kejati Samy Sapulette. Ketika dimintai konfirmasi, Samy tak mengelak. Dia membenarkan, Sprinlid atau Surat Perintah Penyelidikan kasus dugaan penyelewengan anggaran proyek Reklamasi Pantai Namlea itu sudah ada. Tapi menurut Samy itu baru sebatas informasi lisan dari tim penyelidik Pidsus Kejati.



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : Kabar Timur Online

“Dan fisik suratnya saya belum lihat, jadi akan dipastikan dulu,” kata Sapulette terpisah dihubungi via ponsel.

Sekadar tahu, Kejati Maluku sebelumnya terkesan loyo menindaklanjuti kasus ini. Alasan klasik, peta politik yang tengah memanas jelang Pilkada Kabupaten Buru waktu itu, tak mengijinkan lembaga penegak hukum ini masuk. Hal itu dibuktikan dengan dipendamnya pengusutan kasus tersebut lebih setahun sejak dilaporkan oleh elemen warga Namlea.

Tapi ketika Manumpak Pane menggantikan Kepala Kejati sebelumnya, Jan Marinka, belum lama ini kasus ini pun didorong. Aspidsus Kejati Victor Saut mengaku, naiknya kasus ini ke tahap penyelidikan sesuai komitmen Manumpak untuk mempercepat pengusutan kasus-kasus yang masih mengendap.

Diberitakan Kabar Timur sebelumnya, pekerjaan tahap I proyek reklamasi Pantai Namlea dianggarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Buru yang bersumber dari APBN tahun 2015 sebesar Rp 4.911.700.000. Proyek dikerjakan oleh CV Aego Media Pratama milik salah satu keluarga dekat Bupati Buru Ramly Umasugi.

Anggaran sebanyak itu diperuntukan untuk pekerjaan pemancangan tiang dan penimbunan kawasan Pantai Merah Putih. Ternyata pemancangan tiang tidak pernah dikerjakan, tapi dilaporkan rampung 100 persen.

Sebut saja pekerjaan utama pemancangan tiang untuk mengganti pondasi talud sepanjang 140 meter. Tapi tidak dikerjakan. Tidak ada tiang yang dipasang. Malah pekerjaan diganti dengan menimbun batu dari buangan bandara Namniwel di Desa Sawa.



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : Kabar Timur Online

Padahal pekerjaan pemancangan tiang sendiri dari data pelelangan, menghabiskan anggaran sebesar Rp 2,6 miliar. Anggaran tersebut untuk pemancangan tiang berdiameter 60 centimeter untuk 300 tiang.

Timbunannya juga yang seharusnya memakai tanah pilihan. Tapi namun diganti dengan limbah buangan yang diambil dari bandara Namniwel Sawa. Jika dihitung, total keseluruhan pekerjaan reklamasi pantai dan tiang pancang hanya menghabiskan Rp 1 miliar dari total kontrak senilai Rp 4,9 miliar.

Dan sejak awal tender yang dimulai dari proses lelang, diduga ada yang tak beres terjadi, antara panitia lelang Dinas PU Kabupaten Buru dengan CV Aego Media Pratama. Proses lelang disebut-sebut hanya formalitas. Sebab sejak awal sudah tersebar kabar CVAego Media Pratama, keluar sebagai pemenang lelang. **(KTA)**

<http://www.kabartimur.co.id/detail/indeks/utama/12846-Proyek-Mangkrak-Pemda-Buru-Masuk-Radar-Kejati>